Pendidikan IPS Sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi *Tri Hita Karana* (Studi Etnografi tentang Pengaruh Masyarakat terhadap Program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, Bali)

❑ **Sukadi**
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja (Bali)

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan menjelaskan pola hubungan antara konteks sosial budaya masyarakat Bali (baik pada lingkup kehidupan masyarakat lokal, nasional, maupun lingkup kehidupan pariwisata global) dan penyelenggaraan program Pendidikan IPS di SMU Negeri 1 Ubud yang berbasis ideologi Tri Hita Karana serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan Pendidikan IPS dalam rangka pembentukan generasi muda siswa modern berwatak Bali.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian etnografi pendidikan pada kasus di SMU Negeri 1 Ubud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konteks sosial budaya masyarakat Bali dalam lingkup kehidupan masyarakat lokal, kehidupan berbangsa, dan kehidupan pariwisata global memberikan landasan dalam pengembangan visi, misi, dan pelaksanaan Pendidikan IPS di SMU Negeri 1 Ubud berbasis idelogi Tri Hita Karana. Ini menunjukkan bahwa konteks sosial budaya masyarakat Bali memberikan basis bagi proses reproduksi budaya dalam penyelenggaraan Pendidikan IPS yang lebih dimaknai guru-guru dan siswa sebagai proses pemberdayaan peserta didik yang memungkinkan mereka memiliki dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan, nilai-nilai dan sikap, serta keterampilan sosial secara partisipatif dalam pembelajaran terhadap kehidupan sosial budaya lokal, nasional, dan global. Pendidikan IPS seperti ini diyakini telah menghasilkan generasi muda modern berwatak Bali, yang antara lain diindikasikan oleh orientasi nilai siswa cukup modern, pemahaman sosial budaya dan agama Hindu cukup baik, pemahaman konsep Tri Hita Karana cukup, orentasi nilai Tri Hita Karana tinggi, praktik kehidupan Tri Hita Karana cukup tinggi, serta kecenderungan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan menjadi wiraswastawan setelah tamat setiap tahunnya meningkat. Ada indikasi pula bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam orientasi nilai modern dan nilai Tri Hita Karana siswa berdasarkan klasifikasi gender.

Kata-kata kunci: Pendidikan IPS, rekonstruksi pengalaman budaya, ideologi Tri Hita Karana.

Latar Belakang

Pendidikan di sekolah -- termasuk Pendidikan IPS -- tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya masyarakat. Dalam hal ini, Pendidikan IPS adalah suatu proses sosial budaya. Para pendidik menyadari bahwa proses belajar mengajar ikut dipengaruhi oleh *core values, beliefs, attitudes*, dan juga strategi komunikasi dan kognisi serta pola-pola bahasa dari budaya pendukungnya. Demikian juga, proses pendidikan dapat berkaitan dengan struktur dan sistem sosial dari masyarakat (Pai, 1990).

Kondisi program Pendidikan IPS di Bali pada umumnya mencerminkan gambaran fenomena di atas. Walaupun kurikulum Pendidikan IPS di sekolah-sekolah telah diterapkan secara nasional, dalam praktiknya tidak lepas dari pengaruh-pengaruh budaya lokal sebagaimana yang terkonstruksi melalui pengalaman budaya para pendukungnya (Lasmawan, 2002; Suryani, 1992). Fenomena ini jelas memberikan gambaran pada keunikan dan elaborasi dalam penerapan program Pendidikan IPS di Bali yang dampaknya perlu diamati dan dikaji secara mendalam untuk memungkinkan diambil langkah-langkah yang progresif dan produktif untuk meningkatkan kualitas Pendidikan IPS berbasis pada model kurikulum dan pembelajaran rekonstruksi

sosial (lihat, misalnya: Taba, 1962; Sukmadinata, 2000).

Tujuan yang terakhir dalam rangka rekonstruksi sosial dalam Pendidikan IPS ini dinilai amat urgen dan mendesak seiring dengan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada pendidikan berbasis masyarakat luas (*broad-based education)* (Suryadi, 2002). Pendidikan IPS yang berorientasi seperti ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika model pendidikan di Indonesia hanya menekankan pandangan-pandangan perenialisme dan esensialisme belaka (Somantri, 2001). Pendidikan IPS haruslah berorientasi pada rekonstruksionisme pendidikan atau rekonstruksionisme sosial (Somantri, 2001). Seperti dikatakan oleh Counts (dikutip oleh Van Scotter, et al., 1985: 60) bahwa: "*Reconstructionists believe that an image of the ideal society should be the basis for determining educational programs; schools should seek to educate future citizens for a society of the future, a society that is becoming rather than one that currently exists*".

Berpegang pada asumsi-asumsi serta fenomena di atas, mempelajari bagaimana konteks sosial budaya masyarakat, termasuk ideologi masyarakat yang merupakan rekonstruksi pengalaman budaya, turut mewarnai praktik proses Pendidikan IPS di Bali khususnya adalah sangat penting, karena kajian-kajian seperti ini terutama melalui penelitian ilmiah yang bersifat komprehensif belum pernah dilakukan di Indonesia dan di Bali khususnya. Dalam kasus ini peneliti menduga bahwa idoelogi orang Bali tentang *Tri Hita Karana* serta implikasi sosial budaya dan perubahannya, yang merupakan pandangan orang Bali tentang dunia dan nilai-nilainya, secara *inherent* turut membentuk konteks sosial budaya kemasyarakatan dari proses Pendidikan IPS di Bali. Konteks sosial budaya ini, selanjutnya, akan mempengaruhi para pengambil kebijakan, pendidik, orang tua murid dan masyarakat, serta siswa di Bali dalam mengembangkan, menerapkan, serta membentuk pemahaman mereka mengenai pengetahuan ilmiah tentang dunia sosialnya sebagai diajarkan dalam Pendidikan IPS (lihat Subagia, 2000).

Dari deskripsi latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapatlah difokuskan permasalahan penelitian ini pada hubungan tiga permasalahan utama, yaitu latar konteks kemasyarakatan (ideologi, sosial, dan budaya) orang Bali yang turut mewarnai praktik pendidikan IPS di sekolah, konteks kebijakan dan implementasi pendidikan IPS itu sendiri, serta dampak pendidikan IPS yang berbasis pada konteks kemasyarakatan tersebut pada hasil belajar pendidikan IPS siswa terutama pada upaya pembentukan generasi muda modern berwatak Bali.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menemukan prinsip-prinsip atau abstraksi yang dapat menjelaskan bagaimana ideologi, orientasi nilai-nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat Bali dijadikan dasar dalam proses rekonstruksi penyelenggaraan program pendidikan IPS di SMU Negeri 1 Ubud.
2. Menemukan karakteristik atau profil penyelenggaraan pendidikan sosial dan Pendidikan IPS sebagai proses enkulturasi dan akulturasi budaya di lingkungan SMU Negeri 1 Ubud yang menunjukkan adanya pengaruh konteks sosial, budaya, dan ideologi masyarakatnya, yang tercermin dalam persepsi dan orientasi nilai para pendidik dan siswa; dasar-dasar filsofis (ideologis), sosiobudaya, dan psikologis yang melandasi persepsi dan orientasi nilai tersebut; cara para pendidik dan siswa memformulasikan hakikat belajar dan tujuan-tujuan pendidikan IPS sebagai proses budaya; pilihan materi pembelajaran; pilihan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran; pilihan sumber dan fasilitas belajar pendukung; serta konflik-konflik kepentingan yang dihadapi para pendidik dan alternatif pemecahannya.
3. Menemukan prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan hubungan antara dua fenomena di atas dengan *output*nya pada atau dampaknya terhadap hasil belajar siswa terutama dalam hal penguasaan pengetahuan sosial budaya dan agama (Hindu Bali), orientasi nilai modern dan *tri hita karana*

siswa, pandangan/sikapnya dalam pemecahan konflik kepentingan, dan minat siswa setelah tamat SMU yang dikaitkan pula dengan distribusi jenjang kelas siswa dan kelompok gendernya.

4. Menemukan satu pandangan baru tentang visi, misi, tujuan, serta hakikat belajar dan pembelajaran Pendidikan IPS di tingkat sekolah menengah sebagai implikasi dari temuan-temuan di atas dengan merekonstruksi pengalaman belajar yang bersumber dari nilai-nilai agama lokal, pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai nasional, serta dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian etnografi pendidikan pada kasus di SMU Negeri 1 Ubud. Subjek penelitian ini adalah informan kepala sekolah, beberapa orang guru dan siswa, ketua komite sekolah, dan partisipan masyarakat yang dipilih secara *purpossive* dan teknik *snowball*. Responden siswa juga dipilih untuk kepentingan pengukuran hasil belajarnya dengan menggunakan teknik *stratified proportional random sampling*. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi, wawancara mendalam, diksusi kelompok dan kelas, penyebaran inventori nilai, pemberian tes, dan pemberian angket. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum dapat dikatakan, penelitian ini menemukan bahwa konteks sosial, budaya, politik, ideologi, dan perkembangan ekonomi masyarakat Bali khususnya turut mempengaruhi pengembangan visi dan misi serta praktik pendidikan sekolah khususnya di SMU Negeri 1 Ubud. Dengan begitu, Pendidikan IPS sebagai salah satu program pendidikan sekolah yang diharapkan memberdayakan siswa dari segi pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, serta keterampilan-keterampilan sosial kemasyarakatan juga tidak dapat lepas dari konteks masyarakat yang melingkupinya. Berbagai konteks kemasyarakatan tersebut memberikan pengalaman sosial budaya kepada seluruh sivitas sekolah, dan dengannya mereka kemudian merekonstruksi pengembangan program Pendidikan IPS agar lebih mampu menghasilkan generasi muda siswa yang modern berwatak Bali (lihat Nelson, 1991).

Konteks kemasyarakatan yang turut mempengaruhi program pendidikan di SMU Negeri 1 Ubud tidak bisa dilepaskan dari tiga level kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan masyarakat lokal Bali dalam rangka gerakan moral *ajeg* Bali, kepentingan nasional dalam rangka pembangunan karakter nasionalisme bangsa, dan kepentingan global yang terutama dibawa oleh kepentingan pembangunan pariwisata di Bali dalam rangka modernisasi masyarakat Bali (Bandingkan dengan Nelson, 1991). Dalam upaya memenuhi ketiga level kepentingan masyarakat tersebut, seluruh komponen sivitas sekolah menganggap bahwa penggunaan ideologi *Tri Hita Karana* sebagai *core values* yang mempedomani pengembangan program pendidikan sekolah, termasuk pengembangan program Pendidikan IPS yang relevan, tidaklah dapat diabaikan. Penggunaan basis ideologi lokal masyarakat Bali ini tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir (strukturalisme) masyarakat Bali yang mencerminkan oposisi biner dalam hubungan antara keseimbangan kekuatan *buana alit* dan *buana agung* (lihat Ahimsa-Putra, 2001). Ini berarti penggunaan basis ideologi lokal ini sebagai simbol kekuatan *buana alit* tidak pula dapat dilepaskan dari basis ideologi nasional dan global sebagai simbol kekuatan *buana agung* yang sesungguhnya kedua kekuatan tersebut adalah saling melengkapi (berkomplementer)(Bandingkan dengan Badcock, 2006;Boon, 1985).

Konteks kepentingan yang pertama yang memberi nuansa pada pengembangan program pendidikan pada umumnya, dan Pendidikan IPS pada khususnya, di SMU Negeri 1 Ubud adalah kepentingan masyarakat dalam rangka *ajeg* Bali (kelangsungan atau kelestarian alam, masyarakat, dan kebudayaan Bali). Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat dalam arah perubahan sosial dan budaya masyarakat Bali dewasa ini yang

menghendaki tetap dapat mempertahankan struktur sosial dan nilai-nilai dasar fundamental yang melandasi sistem masyarakat dan kebudayaan Bali berbasis ajaran Agama Hindu Bali yang tersarikan dalam ideologi *Tri Hita Karana* (McKean, 1973; Widja, 1993, 1991, 1989). Struktur sosial, nilai-nilai ideal, dan tindakan sosial yang hendak dipertahankan dalam rangka *ajeg* Bali menurut guru-guru dan siswa SMU Negeri 1 Ubud tersebut, antara lain: tetap terpeliharanya praktik kehidupan religius berbasis ajaran Hindu yang tersarikan dalam ajaran *Tri Hita Karana*, kehidupan sosial berbasis sistem kekerabatan patrilinial yang mampu mempertahankan warisan-warisan budaya leluhur, memajukan kehidupan kreativitas berkesenian dan bahasa Bali, kehidupan yang selaras dengan alam dengan tetap terpeliharanya alam pulau Bali yang asri dan lestari, menciptakan kehidupan yang damai, dan kehidupan yang berkeseimbangan antara kepentingan *sekala* dan *niskala* (kesejahteraan lahir dan bathin)(Geriya, 1996; 1993; Sujana, 1994). Pendidikan IPS diharapkan berkontribusi pada upaya melahirkan generasi muda siswa Bali yang modern yang dapat mewariskan nilai-nilai *ajeg* Bali tersebut.

Konteks kepentingan yang kedua dan paling berpengaruh adalah kepentingan nasional dalam rangka pembangunan karakter nasionalisme bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Dikatakan paling berpengaruh karena Pendidikan IPS itu sendiri sesungguhnya membawa visi dan misi nasionalisme tersebut (Widja, 1991). Dengan menggunakan pespektif ajaran Hindu, sesungguhnya kepentingan nasional seperti ini bagi masyarakat Bali merupakan bentuk dan tujuan pelaksanaan *dharma negara* berlandaskan ajaran *dharma agama*. Di sini masyarakat Bali memandang bangsa dan negara kesatuan RI sebagai unsur kekuatan *buana agung* yang memiliki nilai-nilai transenden dan menjadikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara sebagai tugas-tugas suci. Tidak mengherankan, karena itu, dari perspekif ideologi *Tri Hita Karana* Hindu, bagi masyarakat Bali ideologi nasional Pancasila, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan Indonesia, tumbuhnya organisasi-organisasi sosial politik dalam skala nasional, munculnya isu-isu demokrasi pemerinatahan, serta merebaknya tuntutan hak-hak azasi manusia terutama dalam isu kesetaraan gender, misalnya, adalah kekuatan-kekuatan *buana agung* yang harus diakomodasi dalam bekerjanya hukum *rwa bhinneda*. Kekuatan-kekuatan ini bukanlah sesuatu yang harus ditolak, melainkan harus menjadi pelengkap (komplementer) bagi upaya mencapai dan menciptakan tujuan-tujuan hidup dalam kehidupan yang lebih luas dan lebih menyeluruh.

Konteks kepentingan yang ketiga adalah bekerjanya kepentingan global dalam masyarakat untuk kepentingan-kepentingan modernisasi yang rasional berskala global dalam hubungan antar bangsa yang terutama dibawa oleh pembangunan sektor pariwisata di Bali. Bagi masyarakat Ubud dan komponen sivitas SMU Negeri 1 Ubud sebagai bagian dari masyarakat Bali, kepentingan global yang dibonceng oleh perkembangan pariwisata di Bali bukanlah kekuatan modernisasi yang harus ditakuti, karena kenyataannya pariwisata sendiri telah membawa berkah kehidupan materi yang melimpah kepada masyarakat. Hanya saja jenis aktivitas pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata alam dan budaya. Kebijakan ini, tidak saja membuat masyarakat dan kebudayaan Bali bisa berjalan seiring dengan kepentingan global pariwisata, tetapi pariwisata sendiri telah memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat, termasuk menjadi faktor eksternal dalam memodernisasi masyarakat menuju masyarakat industri pariwisata yang rasional, profesional, berwawasan ke depan, berpikir dalam skala global, menghargai waktu dan kapital, dan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keterkaitan program Pendidikan IPS di SMU Negeri 1 Ubud dengan latar konteks lingkungan sosial budaya masyarakat Bali secara utuh dan menyeluruh dalam konteks lokal, nasional, dan global dapat diketahui dari keyakinan, nilai-nilai, dan sikap para pendidik dan siswa SMU Negeri 1 Ubud terhadap proses

perubahan sosial budaya masyarakat Bali dewasa ini yang melahirkan persetujuan mereka terhadap konsep *ajeg* Bali. Dalam praktik pendidikan IPS di sekolah gerakan ini dimaknai sebagai upaya pendidikan untuk melahirkan generasi muda modern berwatak Bali, yaitu generasi muda yang mampu berpikir global (*think globally*), bertindak dengan landasan nilai-nilai budaya lokal (*act locally*) tetapi tetap juga respek dan memegang komitmen untuk memajukan kebudayaan nasional dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*respect and commit nationally*).

Ketiga level orientasi nilai budaya (lokal, nasional, dan global) di atas, walau dalam praktiknya tidak dapat lekang dari konflik nilai karena proses dominasi dan hegemoni kebudayaan nasional, secara keseluruhan juga bersinergi dan bersama-sama melandasi pengembangan visi sekolah dalam rangka pengembangkan sumber daya manusia yang bermutu, beriman, dan berbudaya. Ini selanjutnya mempengaruhi kebijakan-kebijakan sekolah dalam upaya mewujudkan visi sekolah, termasuk dalam pengembangan visi Pendidikan IPS (Nelson, 1991). Dengan kondisi seperti ini, Pendidikan IPS diberi makna oleh guru-guru dan siswa menjadi proses pemberdayaan peserta didik yang memungkinkan mereka memiliki dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan, nilai-nilai dan sikap, serta keterampilan sosial secara partisipatif dalam pembelajaran terhadap kehidupan sosial budaya lokal, nasional, dan global (bandingkan dengan Stopsky and Lee, 1994). Dengan makna seperti itu, maka kebijakan pendidikan di SMU Negeri 1 Ubud, terutama dalam mewujudkan misi Pendidikan IPS, berupaya memfasilitasi siswa agar mereka memperoleh akses yang seluas-luasnya dalam mempelajari kehidupan sosial budaya masyarakat secara partisipatif, baik pada kehidupan sosial budaya Bali berbasis nilai-nilai *Tri Hita Karana* di tingkat lokal, kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai nasionalisme Pancasila di tingkat nasional, maupun pada tingkat kepentingan kehidupan masyarakat global dengan nilai-nilai modern yang rasional, yang terutama dibawa oleh perkembangan pariwisata.

Visi dan misi Pendidikan IPS yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan untuk memfasilitasi siswa dapat secara partisipastif dalam pembelajaran terhadat kehidupan sosial budaya masyarakat lokal, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kehidupan masyarakat global seperti di atas diperkuat juga oleh pengaruh agen-agen perubahan sosial budaya yang ada. Agen-agen sosial tersebut antara lain adalah baik yang dijalankan oleh birokrasi pemerintahan, khususnya jajaran Departemen Pendidikan Nasional beserta kepanjangan tangannya di daerah, maupun agen-agen perubahan sosial yang ada pada masyarakat Bali khususnya, seperti: peranan yang dibawakan oleh lembaga keluarga, lembaga puri Ubud, desa adat dan desa dinas Ubud khususnya, peranan PHDI dan Badan Pembina Lembaga Adat (BPLA), peranan seniman-seniman Ubud, peranan *seka-seka* kesenian di Ubud, peranan media massa termasuk media massa lokal, peranan dunia industri pariwisata, dan peranan masyarakat Ubud serta masyarakat Bali pada umumnya. Dengan peranan unik yang diberikan masing-masing agen sosial kepada sekolah sesuai dengan *swadharma*nya, sekolah (guru-guru) dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara partisipatif tentang kehidupan sosial budaya masyarakatnya secara utuh baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global (bandingkan dengan Nelson, 1991).

Dalam praktiknya, sekolah memang tidak mudah dapat mewujudkan visi program Pendidikan IPS seperti diharapkan di atas. Secara kurikuler, sebagai konsekuensi dari kebijakan pelaksanaan kurikulum Pendidikan IPS secara nasional, guru-guru sesungguhnya tidak dapat melepaskan diri dari interpretasinya terhadap kurikulum yang lebih menekankan pendekatan *subject matter*. Implikasinya, Pendidikan IPS dilaksanakan tidak lebih dari pembelajaran materi fakta-fakta dan konsep-konsep dasar dari beberapa ilmu sosial dan humaniora seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Sejarah, Geografi,

Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi, dan Tata Negara. Dengan status Pendidikan IPS seperti ini, tujuan Pendidikan IPS sepertinya tidak lebih dari pada mentransfer pengetahuan tentang fakta-fakta dan konsep-konsep dasar ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti di atas kepada siswa yang keberhasilannyapun dievaluasi menggunakan pendekatan tes objektif pilihan ganda yang bersifat artifisial (Somantri, 2001).

Begitu pula, dari segi substansi, materi Pendidikan IPS lebih menempatkan pengetahuan verbal dan nilai-nilai yang berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam kepentingan yang demikian masyarakat dan kebudayaan Indonesia dipelajari dari pengertian dominasi dan hegemoni kekuasaan negara yang menempatkan kebudayaan nasional dalam makna-makna fungsionalistik yang menghasilkan konsep pendidikan nilai dan moral dalam rangka menciptakan keselarasan, keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat bersama, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi Pendidikan IPS yang demikian tidak memberikan tempat pada kajian kritis terhadap manusia-manusia Indonesia yang unggul yang berhasil mengembangkan kemampuan dan kepribadian secara mandiri serta secara gigih, inovatif, dan kreatif melakukan pembaharuan di dalam masyarakat. Begitu pula tidak ada tempat bagi upaya mengkaji peranan kebudayaan lokal secara kritis dalam rangka pembentukan kebudayaan nasional yang berparadigma multikultural. Sedapat mungkin, kajian terhadap masyarakat dan kebudayaan Indonesia juga tidak dilakukan dengan pendekatan struktural, apalagi pendekatan konflik. Hasilnya adalah bentuk Pendidikan IPS sebagai pendidikan "*dharmasastra*" (Mulder, 2003). Dari kaca mata ini, Pendidikan IPS sesungguhnya merupakan proses enkulturasi budaya bagi kepentingan mensosialisasikan dan menginternalisasikan pemahaman konsep dan nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan nasional yang fungsionalistik (Abdullah, 1999; Mulder, 2003; Widja 2001).

Menyadari kelemahan program Pendidikan IPS secara kurikuler seperti di atas, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang terakomodasi dalam pengembangan visi sekolah dalam pengembangan SDM bermutu, beriman, dan berbudaya, maka upaya rekonstruksi Pendidikan IPS dilakukan sekolah. Untuk ini perkembangan kepentingan masyarakat lokal dalam rangka *ajeg* Bali, kepentingan nasional, dan kepentingan masyarakat global yang bermain di Bali dicoba diakomodasi. Untuk ini pendekatan keselarasan dan pendekatan konflik digunakan untuk menjelaskan pengembangan paradigma pendidikan sosial yang berorientasi pada pengembangan kemampuan dan nilai-nilai seperti dalam adagium "*think globally, act locally, and commit nationally*". Di sini tiga ideologi dengan kebudayaannya, yakni *Tri Hita Karana*, Pancasila, dan modernisme, tidak saja dijelaskan relevansinya, tetapi dianalisis pula peluang-peluang dan tantangan konfliknya.

Dalam hal relevansinya, diyakini bahwa ketiga level ideologi di atas memiliki kandungan ide atau gagasan, pemikiran, harapan atau cita-cita, dan nilai-nilai yang universal, walau masing-masing juga memiliki makna yang unik dalam kesatuan unsur-unsurnya. Dengan keyakinan ini tidak akan menjadi persoalan jika Pendidikan IPS menjadi wahana pemberdayaan siswa secara seimbang dalam mempelajari ketiga level masyarakat dengan kebudayaannya (lokal, nasional, dan global) berlandaskan ideologinya masing-masing. Dengan makna Pendidikan IPS seperti ini, peserta didik dapat belajar secara partisipatif dalam kehidupan sosial budaya masyarakat lokal sementara tetap menghargai atau *respect* terhadap kehidupan berbangsa dengan nilai-nilai nasionalismenya tanpa mengabaikan pula pemikiran-pemikiran global dalam rangka mewujudkan harapan-harapan atau cita-cita dan nilai-nilai yang lebih universal (Cogan, et al, 1997. Di sinilah Pendidikan IPS dapat memiliki misi sosio-paedagogis, misi sosio-akademis, dan misi sosio-kulturalnya (Winataputra, 2001). Dengan kelemahan program Pendidikan IPS secara kurikuler yang tampak hanya menjalankan misi sosio-paedagogisnya secara terbatas, maka pengembangan program Pendidikan IPS juga

diarahkan kepada pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah dalam rangka memberdayakan peserta didik untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan sosial pada umumnya. Pemanfaatan sumber-sumber daya yang dimaksud meliputi: penciptaan iklim lingkungan pendidikan sosial di sekolah berbasis ideologi *Tri Hita Karana*; pemanfaatan daya dukung keluarga dan masyarakat sekitar sekolah dalam kerja sama sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat; pemanfaatan daya dukung dunia industri pariwisata; pemanfaatan daya dukung dinas dan intansi serta lembaga-lembaga terkait; pemanfataan secara optimal seluruh sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan bimbingan siswa, serta penciptaan iklim lingkungan belajar yang kondusif; pemanfaatan daya dukung kualitas kepemimpinan sekolah yang demokratis; serta yang tidak kalah pentingnya juga adalah upaya optimalisasi pemberdayaan kemandirian guru-guru dan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan sekolah yang telah digariskan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

Praktik program Pendidikan IPS dengan makna, visi, dan misi seperti di atas ternyata tidak luput dari dinamika konflik. Konflik yang muncul dapat terjadi antara dominasi kepentingan nasional yang berkompetisi dengan kepentingan masyarakat lokal yang tersubordinasi dalam proses Pendidikan IPS. Dapat pula terjadi konflik nilai antara nilai-nilai lokal dan nasional yang berbasis pada keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan dengan nilai-nilai global yang bertumpu pada rasionalisme empirik dan eksploitasi sumber-sumber daya. Tidak mengherankan jika dapat berlaku standar ganda dalam penilaian keberhasilan proses pendidikan. Begitu pula dengan adanya pandangan, nilai-nilai, dan sikap yang ambivalen, tidak saja pada siswa, tetapi juga bahkan pada guru-guru. Kondisi seperti ini sesungguhnya masih diterima dengan mengacu kepada penerimaan orang Bali atas hukum *rwa bhinneda*. Pendekatan yang dilakukan sekolah terhadap konflik, di samping mengembangkan iklim dan praktik demokrasi dengan memberikan penghargaan terhadap adanya perbedaan sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik yang membahayakan, juga dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang rasional dan humanis dalam resolusi konflik. Untuk ini dikembangkanlah nilai-nilai dan sikap tengggang rasa, bersabar, *mulat sarira*, tidak menyalahkan orang lain, tidak menghukum sebagai jalan utama, memaafkan, kepemimpinan yang demokratis, dan hubungan sosial atas dasar *menyama braya*.

Praktik program Pendidikan IPS yang tidak terlepas dari konteks kemasyarakatan seperti di atas dapat dikakatan telah menghasilkan generasi muda modern berwatak Bali. Karakteristik hasil belajar seperti itu antara lain ditunjukkan dalam orientasi nilai modern siswa yang tinggi (bandingkan dengan Dantes, 1989; Sukadi, 1994); pengetahuan sosial budaya dan agama Hindu siswa cukup tinggi; pemahaman, orientasi nilai, dan praktik *tri hita karana* siswa yan tergolong tinggi; pandangan dan sikap siswa terhadap isu-isu konflik kepentingan lokal, nasional, dan global yang cenderung demokratis; serta minat siswa untuk melanjutkan studi dan menjadi wiraswastawan setelah tamat tergolong cukup.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapatlah disimpulkan bahwa konteks sosial budaya masyarakat Bali dalam lingkup kehidupan masyarakat lokal, kehidupan berbangsa, dan kehidupan pariwisata global memberikan landasan dalam pengembangan visi, misi, dan pelaksanaan Pendidikan IPS di SMU Negeri 1 Ubud berbasis idelogi *Tri Hita Karana*. Ini menunjukkan bahwa konteks sosial budaya masyarakat Bali memberikan basis bagi proses reproduksi budaya dalam penyelenggaraan Pendidikan IPS yang lebih dimaknai guru-guru dan siswa sebagai proses pemberdayaan peserta didik yang memungkinkan mereka memiliki dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan, nilai-nilai dan sikap, serta keterampilan sosial secara partisipatif dalam pembelajaran terhadap

kehidupan sosial budaya lokal, nasional, dan global. Pendidikan IPS seperti ini diyakini telah menghasilkan generasi muda modern berwatak Bali, yang antara lain diindikasikan oleh orientasi nilai siswa cukup modern, pemahaman sosial budaya dan agama Hindu cukup baik, pemahaman konsep *Tri Hita Karana* cukup, orentasi nilai *Tri Hita Karana* tinggi, praktik kehidupan *Tri Hita Karana* cukup tinggi, serta kecenderungan minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi dan menjadi wiraswastawan setelah tamat setiap tahunnya meningkat. Ada indikasi pula bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam orientasi nilai modern dan nilai *Tri Hita Karana* siswa berdasarkan klasifikasi gender.

Implikasi dan Rekomendasi

Dari berbagai temuan yang telah diformulasikan di atas, penelitian ini memiliki beberapa implikasi teoritis dan praktis. Pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memverifikasi bahwa praktik program Pendidikan IPS merupakan proses sosial budaya.

Tidak itu saja tentunya, konteks proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat, baik dari segi struktur kelembagaan, perjuangan individu-individu atau kelompok unggul atau kelompok tertindas, dinamika perubahan, nilai-nilai, maupun cita-cita masyarakatnya akan turut mewarnai proses, *content*, produk, maupun peranan masing-masing unsur Pendidikan IPS dalam proses menjadinya.

Kedua, sebagai proses sosial budaya, program Pendidikan IPS di sekolah juga merupakan proses enkulturasi ideologi dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia berdasar Pancasila. Di sini, masyarakat dan kebudayaan nasional cenderung dipelajari dalam paradigma fungsionalistik dengan upaya menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indoesia.

Ketiga, seiring dengan perkembangan cita-cita terbentuknya *image* masyarakat global, Pendidikan IPS juga tidak dapat dilepaskan dari harapan-harapan atau cita-cita dan dinamika masyarakat global dengan ideologi modernismenya yang rasional dan eksploitatif.

Keempat, visi Pendidikan IPS sebagai suatu proses sosial budaya menjadi bagian yang integral dari pendidikan sosial budaya pada umumnya. Di tingkat sekolah menengah, Pendidikan IPS merupakan program pendidikan sosial, program pengkajian sosial secara ilmiah, dan program praktik pendidikan sosial secara utuh yang dapat memberdayakan peserta didik untuk dapat mentransformasi dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan, nilai-nilai dan sikap, keterampilan, konfidensi, dan komitmen secara mandiri agar membentuk seperangkat kompetensi sosial yang dapat digunakan dalam rangka partisipasi sosial siswa dalam kehidupan masyarakat di tingkat lokal, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam kehidupan masyarakat di tingkat global sesuai dengan status dan kapabilitas yang dimiliki siswa .

Misi yang relevan dengan visi IPS di tingkat sekolah menengah seperti di atas adalah mencakup misi sosio-paedagogis, misi sosio-akademis, dan misi sosio-kultural. Tujuan belajar IPS siswa, karena itu, mengembangkan kapabilitas atau kompetensi kecakapan hidup bersosial siswa yang mencakup kompetensi personal, sosial, intelektual, akademis, dan vokasional yang dapat digunakan siswa untuk partisipasi sosialnya di masyarakat. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk itu tentu tidaklah mungkin hanya dengan pendekatan *separated subject matter*. Praktik tradisi Pendidikan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ilmu-ilmu sosial, pendidikan dengan *reflective inquiri*, pendekatan pembelajaran terpadu, pendekatan sains teknologi dan masyarakat (STM), dan praktik belajar pengetahuan sosial/ kewarganegaraan dapat disinergikan untuk menghasilkan pendidikan IPS yang *powerful*.

Kelima, untuk memenuhi harapan perkembangan ketiga level masyarakat yang mempengaruhi praktik Pendidikan IPS seperti digambarkan di atas, basis ideologi dan dinamika perkembangan sosial budaya dari ketiga level

masyarakat di atas haruslah juga mendasari pengembangan visi, misi, dan tujuan-tujuan program Pendidikan IPS di tingkat gagasan, dan mendasari pula proses dan prosedur, *content*, produk, cara belajar dan pembelajaran, kriteria keberhasilan, dan strategi evaluasi di tingkat operasional.

Sejalan dengan implikasi teoritis seperti ini, maka pengelolaan program Pendidikan IPS di sekolah dalam mempelajari ketiga level masyarakat dengan kebudayaannya sebagai objek studi tidaklah mungkin hanya dipelajari dari dimensi paradigma fungsionalistik dengan melihat dimensi relevansi atau kesesuaian ideologis dari masing-masing level masyarakat dan kebudayaan. Penggunaan pendekatan paradigma konflik, pendekatan struktural, kajian psikologis, dan pendekatan nilai-nilai budaya tampaknya perlu disinergikan agar menciptakan kesadaran yang utuh terhadap pengertian masyarakat dan kebudayaan yang melahirkan strategi *check and balance* dalam strategi pengembangan kebudayaan untuk menghindarkan terjadinya dominasi dan hegemoni masyarakat dan kebudayaan tertentu terhadap masyarakat dan kebudayaan lainnya. Ini artinya, program Pendidikan IPS haruslah dapat menjadi sarana pendidikan demokrasi, di dalam wahana demokrasi, dan untuk mencapai tujuan-tujuan demokrasi.

Keenam, sejalan dengan harapan-harapan di atas, ada tiga pendekatan yang dapat disinergikan dalam model Pendidikan IPS seperti tertuang dalam gambar berikut.

Gambar: Pengembangan Model Pendidikan IPS dalam rangka Pengem-bangan Kemampuan *Think Globally, Act Locally, and Commit Nationally*

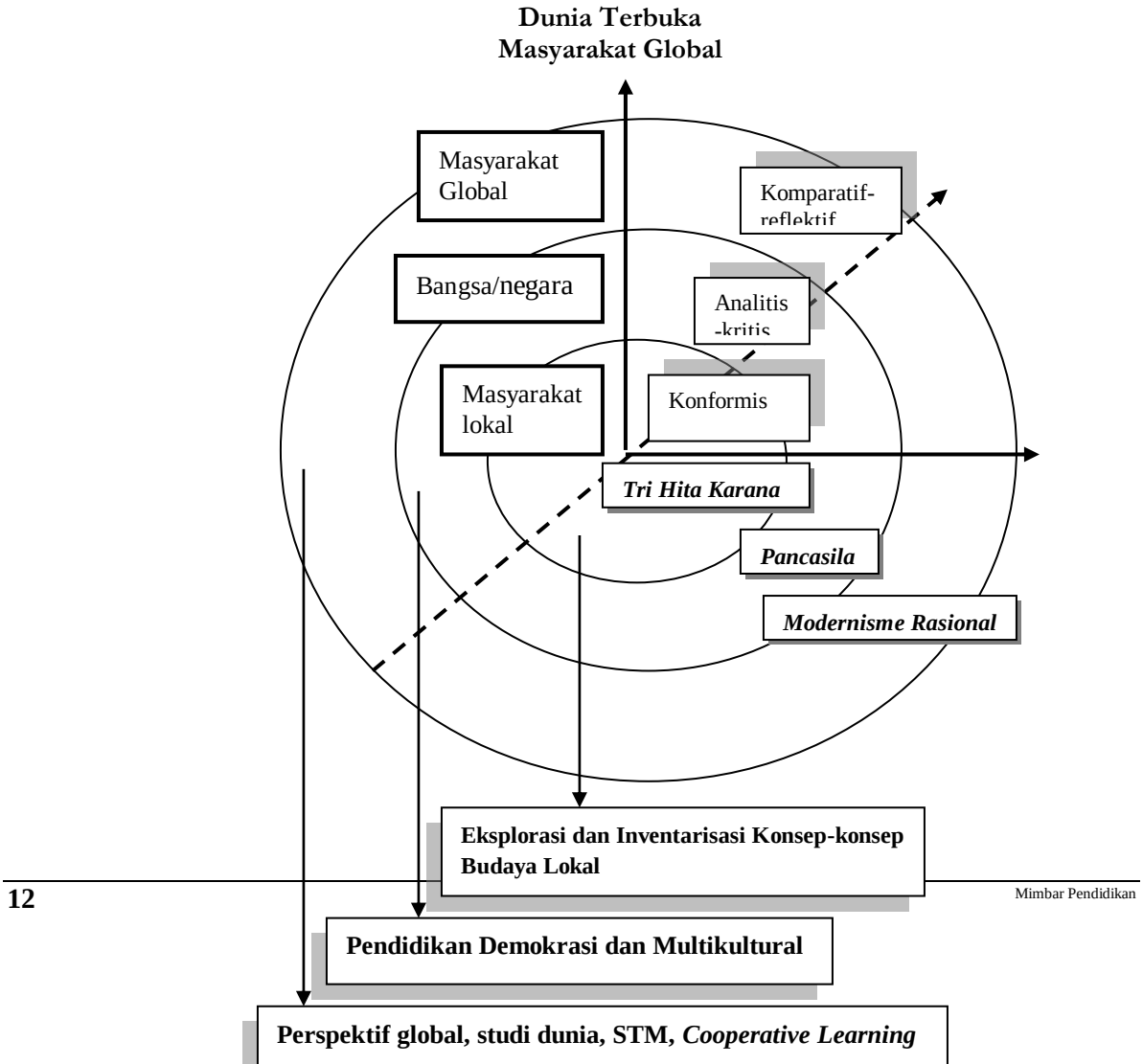

Ketujuh, praktik program Pendidikan IPS yang telah mengakomodasi harapan-harapan yang berkembang di dalam masyarakat lokal, nasional, dan global seperti di atas membawa konsekuensi pada pencapaian beberapa produk belajar sosial siswa yang tidak saja berdimensi pada domain kognisi, tetapi juga meliputi domain-domain nilai-nilai dan sikap serta keterampilan atau perilaku sosial siswa.

Dalam tataran kebijakan dan operasional penyelenggaraan Pendidikan IPS yang lebih praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi pada peningkatan aspek-aspek Pendidikan IPS, yaitu bagi pengembangan kurikulum, pembelajaran, *assessment* hasil belajar, kompetensi guru, pengembangan sumber belajar dan sarana atau alat bantu/media belajar siswa, pengembangan iklim lingkungan belajar siswa, kepemimpinan sekolah, bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang menghasilkan tenaga guru Pendidikan IPS, serta bagi kepentingan studi lebih lanjut.

Daftar Pustaka

Abdullah, T. (1999). "Nasionalisme Indonesia: Dari Asal usul ke Prospek Masa Depan". Dalam *Sejarah No. 8*.

Ahimsa-Putra, H.S. (2001). *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press.

Badcock, C.R. (2006). Levi-Strauss: Structuralism and Sociological Theory. Robby. H.A. (Penerjemah). *LeviStrauss: Strukturalisme dan Theori Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Insight Reference.

Boon, J. (1985. Claude Levi-Strauss. Quentine Skinner (ed). *The Return of Grand Theory in the Human Sciences*. London: Cambridge University Press.

Dantes, I N. (1989). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, Interaksi Remaja dengan Wisatawan, dan Inteligensi Terhadap Nilai Modern Siswa SMA di Bali. Disertasi Program Pasca sarjana IKIP Jakarta: tidak dipublikasikan.

Geriya, I W. (1996). Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global: Bunga Rampai Antropologi Pariwisata. Denpasar: Upada Sastra.

..... (1993). Model Interaksi Kebudayaan dan Industri Pariwisata pada Masyarakat Bali (Satu Refleksi dari Strategi Pembangunan yang berbudaya dalam Era Industrialisasi). Dalam T.R. Sudhartha, et al. (ed). *Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*. Denpasar: Upada Sastra. Hal: 90 – 102.

Lasmawan, I W. (2002). Pengembangan Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Dengan Model Sains-Teknologi-Masyarakat (STM). *Disertasi* (Tidak diterbitkan). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

McKean, P.F. (1973). Cultural Involution: Tourists, Balinese and the Process of Modernization in an Anthropological Perspective. *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Brown University.

Mulder, N. (2003). *Indonesian Images: The Culture of Public Word*. Yogyakarta: Kanisius Publishing House.

Nelson, J. L. (1991). Communities, Local to National, as Influences on Social Studies Education. Dalam James P. Shaver (Ed). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning: a Project of the National Council for the Social Studies*. New York: Macmillan Publishing Company. 332-344.

Pai, Y. (1990). *Cultural Foundations of Education*. New York: Macmillan Publishing Company.

Somantri, M. N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.

Stopsky, F. dan Lee, S. (1994). *Social Studies in a Global Society*. New York: Delmar Publishers Inc.

Subagia, I W. (2000). Balinese Indigenous Worldview and Its Role in The Reforms of Science Education in Bali. *Majalah Ilmiah Aneka Widya, XXXIII (3)*, 71-81.

Sujana, N.N. (1994). Manusia Bali di Persimpangan Jalan. Dalam IG. Pitana (Ed.). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar BP. 45-71.

Sukadi. (1994). Tingkat Religiusitas dan Nilai Modern Siswa SMTA di Bali: Studi tentang Kontribusi Faktor-faktor Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sekolah, dan Interaksi Remaja dengan Wisatawan. Tesis (Tidak dipublikasikan). Jakarta: Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.

Sukmadinata, N. S.. (2000). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.

Suryadi, A. (2002). *Memahami 'Life Skills'*. Media Indonesia (14 Pebruari 2002).

Suryani, L. K. (1992). Pola Asuh dalam Keluarga Hindu di Bali. Dalam Putu Setia (Ed.). *Cendekiawan Hindu Bicara*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha. 117-132.

Taba, H. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Van Scotter, R. D. et al. (1985). *Social Foundations of Education. Second Edition*. Englewood Cliffs, New jersey: Prentice-Hall, Inc.

Widja. I G. (1993). Pelestarian Budaya: Makna dan Implikasinya dalam proses Regenerasi Bangsa. Dalam T.R. Sudhartha, et al. (ed). *Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*. Denpasar: Upada Sastra. Hal: 45 – 63.

..... (1991). Continuity and Change in Balinese Society: An Example from Modern Schooling. Indonesia Circle, No. 54 Mar. 91.

..... (1989). *Bali and Its Society: Continuity and Change*. Makalah. Disampaikan di Sin Petersburg University, Florida, USA.

Winataputra, U.S. (2001). Jati diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). *Disertasi* (Tidak dipublikasikan). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Penulis :

Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed. adalah staf dosen Jurusan PPKN di lembaga yang kini bernama Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, Bali.lulusan program S3 Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung tahun 2006. Sejak tahun 1988. Kantor: Jurusan PPKN, FPIPS, Universitas Pendidikan Ganesha Jalan Udayana Singaraja – Bali, 81116 Telp: (0362) 23884. Rumah: Jl. Sri Rama 6C Desa Baktiseraga, Singaraja – Bali 81151 Telp.: (0362) 28325 / Hp: 081 338 03 66 33, e-mail: adhys_pkn@yahoo.com